



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah tersusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022;

- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022.**

- KESATU : Penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah memiliki laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan kategori atau peringkat kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan hasil penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja terkait;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait;
5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
6. Para Gubernur terkait;
7. Para Bupati terkait;
8. Para Walikota terkait;
9. Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait;
10. Para Rektor Universitas terkait.

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023

Tanggal : 12 Oktober 2023

**PENGERTIAN TINGKAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2022**

Nilai tertinggi yang diperoleh dari keseluruhan aspek pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah 100 (seratus). Adapun peringkat atau kategori yang digunakan sebagai hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH untuk periode Tahun 2022 terbagi atas:

1. Kategori CATUR DANDANI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "*Catur*" = Empat dan "*Dandani*" = Mempersiapkan. Dengan demikian kategori *Catur Dandani* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai **Anggota JDIHN yang masih dalam tahap persiapan**. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIH yang memperoleh penilaian antara 0 s.d. 25;

2. Kategori TRI BUNTARA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "*Tri*" = Tiga dan "*Buntara*" = Bersemangat, dengan demikian kategori *Tri Buntara* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai **Anggota JDIHN yang sedang bersemangat untuk menuju pengelolaan JDIH yang lebih baik**. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 26 s.d. 50;

3. Kategori DWI TUNGGGA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu, "*Dwi*" = Dua dan "*Tungga*" = Tinggi. Dengan demikian kategori *Dwi Tungga* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai **Anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH**. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 51 s.d. 75;

4. Kategori EKA ACALAPATI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "*Eka*" = Pertama dan "*Acalapati*" = Paling Tinggi. Dengan demikian kategori *Eka Acalapati* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai **Anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi Anggota JDIHN lainnya**. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 76 s.d. 100.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

MASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.HN.03.05 TAHUN 2023

Tanggal : 12 Oktober 2023

**HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2022**

I. KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100
2.	Kementerian Keuangan	99
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	98
4.	Kementerian Sosial	98
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	98
6.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	96
7.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	96
8.	Kementerian Ketenagakerjaan	96
9.	Kementerian Perhubungan	94
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	94
11.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	94
12.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	93
13.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93
14.	Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal	92
15.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	92
16.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	91
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	90
18.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	87
19.	Kementerian Pertanian	80
20.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
22.	Kementerian Perdagangan	75
23.	Kementerian Perindustrian	74
24.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	73

No.	Nama Instansi	Nilai
25.	Kementerian Agama	72
26.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	72
27.	Kementerian Luar Negeri	69
28.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	68
29.	Kementerian Pertahanan	68
30.	Kementerian Sekretariat Negara	64
31.	Kementerian Dalam Negeri	63
32.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	52

II. LEMBAGA NEGARA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Pemeriksa Keuangan	98
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	97
3.	Mahkamah Agung	95
4.	Ombudsman Republik Indonesia	95
5.	Dewan Perwakilan Daerah	93
6.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	84
Kategori DWI TUNGGU (Nilai 51 s.d. 75)		
7.	Mahkamah Konstitusi	72
8.	Komisi Pemberantasan Korupsi	69
9.	Komisi Yudisial	67

III. LEMBAGA NON-STRUKTURAL

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Komisi Pemilihan Umum	98
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	97
3.	Komisi Aparatur Sipil Negara	96
4.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	96
5.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	92
6.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	84
7.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	83

Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
8.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	74
9.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	71
10.	Otoritas Jasa Keuangan	65
11.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	61
12.	Komisi Informasi Pusat	55
13.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	54
14.	Dewan Ketahanan Nasional	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
15.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	44
16.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	33

IV. LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	95
2.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	93
3.	Arsip Nasional Republik Indonesia	92
4.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	91
5.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	89
6.	Perpustakaan Nasional	86
7.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	86
8.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	85
9.	Badan Informasi Geospasial	82
10.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	81
11.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	80
12.	Kejaksaan Agung	79
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
13.	Badan Narkotika Nasional	75
14.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	75
15.	Radio Republik Indonesia	75
16.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	72
17.	Badan Keamanan Laut	67

No.	Nama Instansi	Nilai
18.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	67
19.	Badan Standardisasi Nasional	66
20.	Sekretariat Kabinet	62
21.	Tentara Nasional Indonesia	62
22.	Badan Pangan Nasional	61
23.	Badan Siber dan Sandi Negara	61
24.	Lembaga Administrasi Negara	55
25.	Televisi Republik Indonesia	52
26.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
27.	Badan Pusat Statistik	45
28.	Badan Kepegawaian Negara	41
29.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	36
30.	Lembaga Ketahanan Nasional	36

V. PROVINSI

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Provinsi Jawa Tengah	98
2.	Provinsi Bali	97
3.	Provinsi Jawa Barat	96
4.	Provinsi Banten	93
5.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	92
6.	Provinsi Lampung	91
7.	Provinsi DKI Jakarta	90
8.	Provinsi Jawa Timur	90
9.	Provinsi Bengkulu	90
10.	Provinsi Kalimantan Timur	89
11.	Provinsi Sulawesi Selatan	87
12.	Provinsi Sulawesi Tengah	85
13.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	84
14.	Provinsi Jambi	83
15.	Provinsi Kalimantan Utara	81

No.	Nama Instansi	Nilai
16.	Provinsi Aceh	80
17.	Provinsi Sumatera Utara	80
18.	Provinsi Kalimantan Barat	79
19.	Provinsi Sumatera Barat	77
20.	Provinsi Sulawesi Barat	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
21.	Provinsi Riau	74
22.	Provinsi Kalimantan Tengah	71
23.	Provinsi Maluku Utara	71
24.	Provinsi Kalimantan Selatan	70
25.	Provinsi Kepulauan Riau	67
26.	Provinsi Maluku	66
27.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	65
28.	Provinsi Gorontalo	60
29.	Provinsi Sumatera Selatan	60
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	54
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
31.	Provinsi Sulawesi Tenggara	49
32.	Provinsi Papua	40
Kategori CATUR DANDANI (Nilai 0 s.d. 25)		
33.	Provinsi Sulawesi Utara	22
34.	Provinsi Papua Barat	18

VI. KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d 100)			
1.	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	99
2.	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	98
3.	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	97
4.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	96
5.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	95
6.	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	95
7.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	95
8.	Kabupaten Mimika	Papua Tengah	94

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
9.	Kabupaten Gianyar	Bali	94
10.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	94
11.	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	93
12.	Kabupaten Pemasang	Jawa Tengah	92
13.	Kabupaten Blora	Jawa Tengah	91
14.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	91
15.	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	90
16.	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	90
17.	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	90
18.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	90
19.	Kabupaten Lebak	Banten	89
20.	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	88
21.	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	87
22.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	86
23.	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	86
24.	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	86
25.	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	86
26.	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	85
27.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	85
28.	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	84
29.	Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	84
30.	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	84
31.	Kabupaten Sarolangun	Jambi	84
32.	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	83
33.	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	83
34.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	83
35.	Kabupaten Klungkung	Bali	83
36.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	83
37.	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	83
38.	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	82
39.	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	82
40.	Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	82
41.	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	82

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
42.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	82
43.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	82
44.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	82
45.	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	81
46.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	81
47.	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	81
48.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	81
49.	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	81
50.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	80
51.	Kabupaten Buleleng	Bali	79
52.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	79
53.	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	79
54.	Kabupaten Pringsewu	Lampung	79
55.	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	79
56.	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	79
57.	Kabupaten Batanghari	Jambi	78
58.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	78
59.	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	78
60.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	78
61.	Kabupaten Magetan	Jawa Timur	78
62.	Kabupaten Serang	Banten	78
63.	Kabupaten Tabanan	Bali	78
64.	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara	78
65.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	78
66.	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	77
67.	Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta	77
68.	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	77
69.	Kabupaten Kampar	Riau	77
70.	Kabupaten Lebong	Bengkulu	77
71.	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	77
72.	Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	76
73.	Kabupaten Bangli	Bali	76
74.	Kabupaten Blitar	Jawa Timur	76

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
75.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	76
76.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	76
77.	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	76
78.	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	76
79.	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	76
80.	Kabupaten Tangerang	Banten	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
81.	Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah	75
82.	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	75
83.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	75
84.	Kabupaten Garut	Jawa Barat	75
85.	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	75
86.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	75
87.	Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	75
88.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	74
89.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	74
90.	Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	74
91.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	74
92.	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	74
93.	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	74
94.	Kabupaten Pandeglang	Banten	74
95.	Kabupaten Pidie	Aceh	74
96.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	74
97.	Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	74
98.	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	74
99.	Kabupaten Aceh Timur	Aceh	73
100.	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	73
101.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu	73
102.	Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	73
103.	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	73
104.	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	73
105.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	73
106.	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	73

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
107.	Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan	73
108.	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	73
109.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	72
110.	Kabupaten Bireuen	Aceh	72
111.	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	72
112.	Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	72
113.	Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku	72
114.	Kabupaten Kerinci	Jambi	72
115.	Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	72
116.	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	72
117.	Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	72
118.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	71
119.	Kabupaten Batu bara	Sumatera Utara	71
120.	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	71
121.	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	71
122.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	71
123.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	71
124.	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	71
125.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	71
126.	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	71
127.	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	70
128.	Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	70
129.	Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	70
130.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	70
131.	Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	70
132.	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	70
133.	Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	70
134.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	70
135.	Kabupaten Way Kanan	Lampung	70
136.	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	69
137.	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	69
138.	Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan	69
139.	Kabupaten Muko Muko	Bengkulu	69

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
140.	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	69
141.	Kabupaten Rokan Hilir	Riau	69
142.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	69
143.	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	68
144.	Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	68
145.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	68
146.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	68
147.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	68
148.	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	68
149.	Kabupaten Lampung Timur	Lampung	68
150.	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	68
151.	Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	68
152.	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	68
153.	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	68
154.	Kabupaten Toba	Sumatera Utara	68
155.	Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	67
156.	Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	67
157.	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	67
158.	Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	67
159.	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	67
160.	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	67
161.	Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara	67
162.	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah	67
163.	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	67
164.	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	67
165.	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	67
166.	Kabupaten Badung	Bali	66
167.	Kabupaten Pesawaran	Lampung	66
168.	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	66
169.	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	66
170.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	66
171.	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	65
172.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau	65

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
173.	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan	65
174.	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	65
175.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	65
176.	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	65
177.	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	65
178.	Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	65
179.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	64
180.	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	64
181.	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	64
182.	Kabupaten Fak Fak	Papua Barat	64
183.	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	64
184.	Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara	64
185.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	64
186.	Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	64
187.	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	64
188.	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	64
189.	Kabupaten Malang	Jawa Timur	64
190.	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	64
191.	Kabupaten Tebo	Jambi	64
192.	Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	63
193.	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	63
194.	Kabupaten Jembrana	Bali	63
195.	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	63
196.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	63
197.	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	63
198.	Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	63
199.	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	63
200.	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung	63
201.	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	63
202.	Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur	63
203.	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	63
204.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	63
205.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	62

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
206.	Kabupaten Bener Meriah	Aceh	62
207.	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	62
208.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	62
209.	Kabupaten Gayo Lues	Aceh	62
210.	Kabupaten Lampung Utara	Lampung	62
211.	Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	62
212.	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	62
213.	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	62
214.	Kabupaten Pelalawan	Riau	62
215.	Kabupaten Simeulue	Aceh	62
216.	Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	62
217.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung	62
218.	Kabupaten Aceh Utara	Aceh	61
219.	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan	61
220.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	61
221.	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	61
222.	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	61
223.	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	61
224.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	61
225.	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	61
226.	Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh	60
227.	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan	60
228.	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	60
229.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	60
230.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	60
231.	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	60
232.	Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	60
233.	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat	60
234.	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	60
235.	Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	60
236.	Kabupaten Siak	Riau	60
237.	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	60
238.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi	60

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
239.	Kabupaten Aceh Besar	Aceh	59
240.	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	59
241.	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	59
242.	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	59
243.	Kabupaten Seram Bagian Timur	Maluku	59
244.	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	59
245.	Kabupaten Aceh Jaya	Aceh	58
246.	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	58
247.	Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah	58
248.	Kabupaten Jember	Jawa Timur	58
249.	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	58
250.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	58
251.	Kabupaten Bengkalis	Riau	57
252.	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	57
253.	Kabupaten Jayapura	Papua	57
254.	Kabupaten Karangasem	Bali	57
255.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	57
256.	Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah	57
257.	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	57
258.	Kabupaten Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	57
259.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	56
260.	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	56
261.	Kabupaten Seluma	Bengkulu	56
262.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	55
263.	Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara	55
264.	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	54
265.	Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	54
266.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	54
267.	Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	53
268.	Kabupaten Lampung Barat	Lampung	53
269.	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	53
270.	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	53
271.	Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	53

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
272.	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu	53
273.	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	53
274.	Kabupaten Tulang Bawang	Lampung	53
275.	Kabupaten Aceh Barat	Aceh	52
276.	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	52
277.	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	52
278.	Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	52
279.	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	51
280.	Kabupaten Biak Numfor	Papua	51
281.	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	51
282.	Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	51
283.	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	51
284.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	51
285.	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
286.	Kabupaten Aceh Selatan	Aceh	50
287.	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	50
288.	Kabupaten Jayawijaya	Papua Pegunungan	50
289.	Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	50
290.	Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	50
291.	Kabupaten Bungo	Jambi	49
292.	Kabupaten Buru Selatan	Maluku	49
293.	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	49
294.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	48
295.	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	48
296.	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	48
297.	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	47
298.	Kabupaten Kaur	Bengkulu	47
299.	Kabupaten Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara	47
300.	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	47
301.	Kabupaten Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	47
302.	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan	46
303.	Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur	45

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
304.	Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	45
305.	Kabupaten Sampang	Jawa Timur	45
306.	Kabupaten Toli Toli	Sulawesi Tengah	44
307.	Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara	43
308.	Kabupaten Intan Jaya	Papua Tengah	42
309.	Kabupaten Lanny Jaya	Papua Pegunungan	42
310.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	42
311.	Kabupaten Pulau Taliabu	Maluku Utara	42
312.	Kabupaten Rokan Hulu	Riau	42
313.	Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	42
314.	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	41
315.	Kabupaten Boalemo	Gorontalo	41
316.	Kabupaten Buru	Maluku	41
317.	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	41
318.	Kabupaten Supiori	Papua	41
319.	Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat	40
320.	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	40
321.	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	40
322.	Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara	40
323.	Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku	40
324.	Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	40
325.	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	40
326.	Kabupaten Merauke	Papua Selatan	40
327.	Kabupaten Mesuji	Lampung	40
328.	Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara	40
329.	Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	40
330.	Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat	40
331.	Kabupaten Asmat	Papua Selatan	39
332.	Kabupaten Keerom	Papua	39
333.	Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur	39
334.	Kabupaten Nduga	Papua Pegunungan	39
335.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	39
336.	Kabupaten Sarmi	Papua	39

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
337.	Kabupaten Tambrauw	Papua Barat	39
338.	Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	38
339.	Kabupaten Karo	Sumatera Utara	38
340.	Kabupaten Mamberamo Raya	Papua	38
341.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Papua Pegunungan	38
342.	Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur	38
343.	Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	38
344.	Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	38
345.	Kabupaten Mappi	Papua Selatan	38
346.	Kabupaten Maybrat	Papua Barat	38
347.	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	38
348.	Kabupaten Merangin	Jambi	38
349.	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	38
350.	Kabupaten Pahuwato	Gorontalo	38
351.	Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat	38
352.	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	38
353.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	38
354.	Kabupaten Tolikara	Papua Pegunungan	38
355.	Kabupaten Waropen	Papua	38
356.	Kabupaten Yahukimo	Papua Pegunungan	38
357.	Kabupaten Yalimo	Papua Pegunungan	38
358.	Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	37
359.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua	37
360.	Kabupaten Nabire	Papua Tengah	37
361.	Kabupaten Paniai	Papua Tengah	37
362.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Papua Pegunungan	37
363.	Kabupaten Puncak Jaya	Papua Tengah	37
364.	Kabupaten Deiyai	Papua Tengah	36
365.	Kabupaten Dogiyai	Papua Tengah	36
366.	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	36
367.	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	36
368.	Kabupaten Kaimana	Papua Barat	36
369.	Kabupaten Pegunungan Arfak	Papua Barat	36

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
370.	Kabupaten Boven Digoel	Papua Selatan	35
371.	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	34
372.	Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara	33
373.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	32
374.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	30
375.	Kabupaten Subang	Jawa Barat	29
376.	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	28

VII. KOTA

No.	Nama Instansi		Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	Kota Denpasar	Bali	95
2.	Kota Bogor	Jawa Barat	94
3.	Kota Bandung	Jawa Barat	92
4.	Kota Batam	Kepulauan Riau	91
5.	Kota Tegal	Jawa Tengah	90
6.	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	89
7.	Kota Cirebon	Jawa Barat	88
8.	Kota Padang	Sumatera Barat	88
9.	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	87
10.	Kota Surabaya	Jawa Timur	87
11.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	86
12.	Kota Magelang	Jawa Tengah	86
13.	Kota Serang	Banten	86
14.	Kota Ambon	Maluku	85
15.	Kota Sukabumi	Jawa Barat	85
16.	Kota Bekasi	Jawa Barat	84
17.	Kota Tangerang Selatan	Banten	83
18.	Kota Cimahi	Jawa Barat	82
19.	Kota Depok	Jawa Barat	82
20.	Kota Metro	Lampung	82
21.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	82
22.	Kota Salatiga	Jawa Tengah	81

No.	Nama Instansi		Nilai
23.	Kota Semarang	Jawa Tengah	81
24.	Kota Tangerang	Banten	81
25.	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	79
26.	Kota Langsa	Aceh	79
27.	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	79
28.	Kota Madiun	Jawa Timur	78
29.	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	78
30.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	77
31.	Kota Subulussalam	Aceh	77
32.	Kota Banjar	Jawa Barat	76
33.	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	76
34.	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
35.	Kota Jambi	Jambi	75
36.	Kota Lhokseumawe	Aceh	75
37.	Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	75
38.	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	75
39.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	74
40.	Kota Pekanbaru	Riau	74
41.	Kota Bitung	Sulawesi Utara	73
42.	Kota Pariaman	Sumatera Barat	73
43.	Kota Pasuruan	Jawa Timur	72
44.	Kota Surakarta	Jawa Tengah	72
45.	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	72
46.	Kota Sibolga	Sumatera Utara	71
47.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	71
48.	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	70
49.	Kota Bengkulu	Bengkulu	69
50.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	69
51.	Kota Probolinggo	Jawa Timur	68
52.	Kota Batu	Jawa Timur	67
53.	Kota Mojokerto	Jawa Timur	67
54.	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	67

No.	Nama Instansi		Nilai
55.	Kota Sabang	Aceh	67
56.	Kota Binjai	Sumatera Utara	66
57.	Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	65
58.	Kota Blitar	Jawa Timur	65
59.	Kota Malang	Jawa Timur	65
60.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	65
61.	Kota Solok	Sumatera Barat	65
62.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	64
63.	Kota Sorong	Papua Barat	64
64.	Kota Bandar Lampung	Lampung	63
65.	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	63
66.	Kota Dumai	Riau	62
67.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	62
68.	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	62
69.	Kota Banda Aceh	Aceh	61
70.	Kota Medan	Sumatera Utara	61
71.	Kota Sungai Penuh	Jambi	60
72.	Kota Kediri	Jawa Timur	58
73.	Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	58
74.	Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara	58
75.	Kota Ternate	Maluku Utara	58
76.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	57
77.	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	57
78.	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	57
79.	Kota Bontang	Kalimantan Timur	55
80.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	54
81.	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	53
82.	Kota Manado	Sulawesi Utara	53
83.	Kota Cilegon	Banten	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
84.	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	50
85.	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	46
86.	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	44

No.	Nama Instansi		Nilai
87.	Kota Jayapura	Papua	44
88.	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	40
89.	Kota Tual	Maluku	38

VIII. DPRD PROVINSI

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	DPRD Provinsi Lampung	90
2.	DPRD Provinsi Jawa Tengah	89
3.	DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	80
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
4.	DPRD Provinsi Jawa Timur	63
5.	DPRD Provinsi DKI Jakarta	62
6.	DPRD Provinsi Aceh	61
7.	DPRD Provinsi Riau	57
8.	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
9.	DPRD Provinsi Jawa Barat	48
10.	DPRD Provinsi Sumatera Selatan	48
11.	DPRD Provinsi Maluku Utara	47
12.	DPRD Provinsi Maluku	40
13.	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	40
14.	DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat	38
15.	DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	38
16.	DPRD Provinsi Sumatera Utara	38
17.	DPRD Provinsi Jambi	36
18.	DPRD Provinsi Papua	36
19.	DPRD Provinsi Gorontalo	34
20.	DPRD Provinsi Sumatera Barat	32
21.	DPRD Provinsi Kalimantan Barat	31
22.	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	31
23.	DPRD Provinsi Papua Barat	31
24.	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	30

IX. DPRD KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	DPRD Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	94
2.	DPRD Kabupaten Batang	Jawa Tengah	86
3.	DPRD Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	82
4.	DPRD Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	78
5.	DPRD Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	77
6.	DPRD Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	77
7.	DPRD Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	77
8.	DPRD Kabupaten Garut	Jawa Barat	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
9.	DPRD Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	75
10.	DPRD Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	74
11.	DPRD Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	73
12.	DPRD Kabupaten Bengkalis	Riau	73
13.	DPRD Kabupaten Demak	Jawa Tengah	73
14.	DPRD Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	73
15.	DPRD Kabupaten Sarolangun	Jambi	73
16.	DPRD Kabupaten Bener Meriah	Aceh	71
17.	DPRD Kabupaten Bireuen	Aceh	71
18.	DPRD Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	70
19.	DPRD Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	70
20.	DPRD Kabupaten Simeulue	Aceh	70
21.	DPRD Kabupaten Tabanan	Bali	70
22.	DPRD Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	69
23.	DPRD Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	69
24.	DPRD Kabupaten Gayo Lues	Aceh	69
25.	DPRD Kabupaten Jember	Jawa Timur	69
26.	DPRD Kabupaten Aceh Timur	Aceh	68
27.	DPRD Kabupaten Bandung	Jawa Barat	68
28.	DPRD Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	68
29.	DPRD Kabupaten Madiun	Jawa Timur	68

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
30.	DPRD Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	68
31.	DPRD Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	68
32.	DPRD Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	68
33.	DPRD Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah	67
34.	DPRD Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	67
35.	DPRD Kabupaten Aceh Jaya	Aceh	66
36.	DPRD Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	66
37.	DPRD Kabupaten Batang Hari	Jambi	66
38.	DPRD Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	66
39.	DPRD Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	66
40.	DPRD Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	66
41.	DPRD Kabupaten Toba	Sumatera Utara	66
42.	DPRD Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	65
43.	DPRD Kabupaten Blora	Jawa Tengah	65
44.	DPRD Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	65
45.	DPRD Kabupaten Pidie	Aceh	65
46.	DPRD Kabupaten Buleleng	Bali	64
47.	DPRD Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	64
48.	DPRD Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	63
49.	DPRD Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	63
50.	DPRD Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	63
51.	DPRD Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	63
52.	DPRD Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	63
53.	DPRD Kabupaten Aceh Barat	Aceh	62
54.	DPRD Kabupaten Subang	Jawa Barat	62
55.	DPRD Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	62
56.	DPRD Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	61
57.	DPRD Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	61
58.	DPRD Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	61
59.	DPRD Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	61
60.	DPRD Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	61
61.	DPRD Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	61
62.	DPRD Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	61

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
63.	DPRD Kabupaten Batu bara	Sumatera Utara	60
64.	DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau	60
65.	DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	60
66.	DPRD Kabupaten Pati	Jawa Tengah	60
67.	DPRD Kabupaten Pelalawan	Riau	60
68.	DPRD Kabupaten Sampang	Jawa Timur	60
69.	DPRD Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	60
70.	DPRD Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	59
71.	DPRD Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	59
72.	DPRD Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	59
73.	DPRD Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	59
74.	DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	59
75.	DPRD Kabupaten Toli Toli	Sulawesi Tengah	59
76.	DPRD Kabupaten Aceh Utara	Aceh	58
77.	DPRD Kabupaten Badung	Bali	58
78.	DPRD Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	58
79.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	58
80.	DPRD Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	58
81.	DPRD Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	58
82.	DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh	57
83.	DPRD Kabupaten Aceh Besar	Aceh	57
84.	DPRD Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	57
85.	DPRD Kabupaten Bogor	Jawa Barat	57
86.	DPRD Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	57
87.	DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	57
88.	DPRD Kabupaten Pesisir Barat	Lampung	57
89.	DPRD Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	57
90.	DPRD Kabupaten Aceh Selatan	Aceh	56
91.	DPRD Kabupaten Biak Numfor	Papua	56
92.	DPRD Kabupaten Jembrana	Bali	56
93.	DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	56
94.	DPRD Kabupaten Nagan Raya	Aceh	56
95.	DPRD Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	56

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
96.	DPRD Kabupaten Rokan Hilir	Riau	55
97.	DPRD Kabupaten Seluma	Bengkulu	55
98.	DPRD Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	54
99.	DPRD Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	54
100.	DPRD Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	53
101.	DPRD Kabupaten Sorong	Papua Barat	53
102.	DPRD Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	52
103.	DPRD Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	52
104.	DPRD Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	52
105.	DPRD Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	52
106.	DPRD Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	52
107.	DPRD Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	51
108.	DPRD Kabupaten Gresik	Jawa Timur	51
109.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	51
110.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	51
111.	DPRD Kabupaten Karangasem	Bali	51
112.	DPRD Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	51
113.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
114.	DPRD Kabupaten Bangli	Bali	50
115.	DPRD Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	50
116.	DPRD Kabupaten Lampung Barat	Lampung	50
117.	DPRD Kabupaten Malang	Jawa Timur	50
118.	DPRD Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	50
119.	DPRD Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	49
120.	DPRD Kabupaten Magetan	Jawa Timur	49
121.	DPRD Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	49
122.	DPRD Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	49
123.	DPRD Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	49
124.	DPRD Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	48
125.	DPRD Kabupaten Bungo	Jambi	48
126.	DPRD Kabupaten Lebak	Banten	48
127.	DPRD Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan	48

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
128.	DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	48
129.	DPRD Kabupaten Tuban	Jawa Timur	48
130.	DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Lampung	48
131.	DPRD Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	48
132.	DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	47
133.	DPRD Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	47
134.	DPRD Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	47
135.	DPRD Kabupaten Blitar	Jawa Timur	47
136.	DPRD Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	47
137.	DPRD Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	47
138.	DPRD Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	46
139.	DPRD Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	46
140.	DPRD Kabupaten Serang	Banten	46
141.	DPRD Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	45
142.	DPRD Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	45
143.	DPRD Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	44
144.	DPRD Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	43
145.	DPRD Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	43
146.	DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	43
147.	DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung	43
148.	DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu	42
149.	DPRD Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	42
150.	DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	42
151.	DPRD Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	42
152.	DPRD Kabupaten Way Kanan	Lampung	42
153.	DPRD Kabupaten Jombang	Jawa Timur	41
154.	DPRD Kabupaten Karawang	Jawa Barat	41
155.	DPRD Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	41
156.	DPRD Kabupaten Kediri	Jawa Timur	41
157.	DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	40
158.	DPRD Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat	40
159.	DPRD Kabupaten Buru Selatan	Maluku	40
160.	DPRD Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	40

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
161.	DPRD Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	40
162.	DPRD Kabupaten Lampung Utara	Lampung	40
163.	DPRD Kabupaten Mesuji	Lampung	40
164.	DPRD Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	40
165.	DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	40
166.	DPRD Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	40
167.	DPRD Kabupaten Siak	Riau	40
168.	DPRD Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	40
169.	DPRD Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	39
170.	DPRD Kabupaten Lanny Jaya	Papua Pegunungan	39
171.	DPRD Kabupaten Lebong	Bengkulu	39
172.	DPRD Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur	39
173.	DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	39
174.	DPRD Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	39
175.	DPRD Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan	39
176.	DPRD Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	39
177.	DPRD Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur	39
178.	DPRD Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	39
179.	DPRD Kabupaten Mimika	Papua Tengah	39
180.	DPRD Kabupaten Puncak	Papua Tengah	39
181.	DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	39
182.	DPRD Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur	39
183.	DPRD Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	39
184.	DPRD Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	39
185.	DPRD Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	39
186.	DPRD Kabupaten Solok	Sumatera Barat	39
187.	DPRD Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	39
188.	DPRD Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	39
189.	DPRD Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	39
190.	DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	39
191.	DPRD Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	39
192.	DPRD Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat	39
193.	DPRD Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	39

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
194.	DPRD Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	38
195.	DPRD Kabupaten Buru	Maluku	38
196.	DPRD Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara	38
197.	DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	38
198.	DPRD Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	38
199.	DPRD Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku	38
200.	DPRD Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	38
201.	DPRD Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	38
202.	DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	38
203.	DPRD Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	38
204.	DPRD Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur	38
205.	DPRD Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	38
206.	DPRD Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	38
207.	DPRD Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	38
208.	DPRD Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	38
209.	DPRD Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	38
210.	DPRD Kabupaten Merangin	Jambi	38
211.	DPRD Kabupaten Merauke	Papua Selatan	38
212.	DPRD Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	38
213.	DPRD Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	38
214.	DPRD Kabupaten Tebo	Jambi	38
215.	DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	38
216.	DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	38
217.	DPRD Kabupaten Agam	Sumatera Barat	37
218.	DPRD Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	37
219.	DPRD Kabupaten Asmat	Papua Selatan	37
220.	DPRD Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan	37
221.	DPRD Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	37
222.	DPRD Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	37
223.	DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Maluku	37
224.	DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua	37
225.	DPRD Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	37
226.	DPRD Kabupaten Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	37

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
227.	DPRD Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	37
228.	DPRD Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara	37
229.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	36
230.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	36
231.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	36
232.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	36
233.	DPRD Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	36
234.	DPRD Kabupaten Boven Digoel	Papua Selatan	36
235.	DPRD Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah	36
236.	DPRD Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	36
237.	DPRD Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	36
238.	DPRD Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara	36
239.	DPRD Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	36
240.	DPRD Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	36
241.	DPRD Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	36
242.	DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	35
243.	DPRD Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	34
244.	DPRD Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	34
245.	DPRD Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	34
246.	DPRD Kabupaten Jayapura	Papua	33
247.	DPRD Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	32
248.	DPRD Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	32
249.	DPRD Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	32
250.	DPRD Kabupaten Kaimana	Papua Barat	31
251.	DPRD Kabupaten Kampar	Riau	31
252.	DPRD Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	31
253.	DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	31
254.	DPRD Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara	31
255.	DPRD Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	31
256.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	31
257.	DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	31

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
258.	DPRD Kabupaten Boalemo	Gorontalo	30
259.	DPRD Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	30
260.	DPRD Kabupaten Karo	Sumatera Utara	30
261.	DPRD Kabupaten Kaur	Bengkulu	30
262.	DPRD Kabupaten Keerom	Papua	30
263.	DPRD Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	30
264.	DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	30
265.	DPRD Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku	30
266.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	30
267.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	30
268.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	30
269.	DPRD Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	30
270.	DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	30
271.	DPRD Kabupaten Pahuwato	Gorontalo	30
272.	DPRD Kabupaten Pandeglang	Banten	30
273.	DPRD Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	30
274.	DPRD Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	30
275.	DPRD Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	30
276.	DPRD Kabupaten Yalimo	Papua Pegunungan	26
Kategori CATUR DANDANI (Nilai 0 s.d. 25)			
277.	DPRD Kabupaten Yahukimo	Papua Pegunungan	24
278.	DPRD Kabupaten Puncak Jaya	Papua Tengah	23

X. DPRD KOTA

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	DPRD Kota Bandung	Jawa Barat	98
2.	DPRD Kota Batam	Kepulauan Riau	79
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
3.	DPRD Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	74
4.	DPRD Kota Surakarta	Jawa Tengah	74
5.	DPRD Kota Metro	Lampung	73
6.	DPRD Kota Cimahi	Jawa Barat	71
7.	DPRD Kota Tegal	Jawa Tengah	70

No.	Nama Instansi		Nilai
8.	DPRD Kota Subulussalam	Aceh	67
9.	DPRD Kota Bogor	Jawa Barat	66
10.	DPRD Kota Banjar	Jawa Barat	65
11.	DPRD Kota Madiun	Jawa Timur	63
12.	DPRD Kota Sukabumi	Jawa Barat	63
13.	DPRD Kota Malang	Jawa Timur	62
14.	DPRD Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	61
15.	DPRD Kota Cirebon	Jawa Barat	61
16.	DPRD Kota Surabaya	Jawa Timur	61
17.	DPRD Kota Dumai	Riau	60
18.	DPRD Kota Langsa	Aceh	60
19.	DPRD Kota Lhokseumawe	Aceh	60
20.	DPRD Kota Tangerang Selatan	Banten	60
21.	DPRD Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	60
22.	DPRD Kota Banda Aceh	Aceh	58
23.	DPRD Kota Bontang	Kalimantan Timur	58
24.	DPRD Kota Pasuruan	Jawa Timur	58
25.	DPRD Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	57
26.	DPRD Kota Sabang	Aceh	56
27.	DPRD Kota Cilegon	Banten	53
28.	DPRD Kota Kediri	Jawa Timur	53
29.	DPRD Kota Mojokerto	Jawa Timur	52
30.	DPRD Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	52
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
31.	DPRD Kota Bekasi	Jawa Barat	50
32.	DPRD Kota Blitar	Jawa Timur	50
33.	DPRD Kota Palu	Sulawesi Tengah	50
34.	DPRD Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	48
35.	DPRD Kota Padang	Sumatera Barat	41
36.	DPRD Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	41
37.	DPRD Kota Probolinggo	Jawa Timur	41
38.	DPRD Kota Semarang	Jawa Tengah	41
39.	DPRD Kota Batu	Jawa Timur	40

No.	Nama Instansi		Nilai
40.	DPRD Kota Pekalongan	Jawa Tengah	40
41.	DPRD Kota Serang	Banten	40
42.	DPRD Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	39
43.	DPRD Kota Medan	Sumatera Utara	39
44.	DPRD Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	39
45.	DPRD Kota Salatiga	Jawa Tengah	39
46.	DPRD Kota Sungai Penuh	Jambi	39
47.	DPRD Kota Tangerang	Banten	39
48.	DPRD Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	38
49.	DPRD Kota Palembang	Sumatera Selatan	38
50.	DPRD Kota Palopo	Sulawesi Selatan	38
51.	DPRD Kota Bukit Tinggi	Sumatera Barat	37
52.	DPRD Kota Tomohon	Sulawesi Utara	37
53.	DPRD Kota Tual	Maluku	37
54.	DPRD Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	36
55.	DPRD Kota Bengkulu	Bengkulu	36
56.	DPRD Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	36
57.	DPRD Kota Binjai	Sumatera Utara	36
58.	DPRD Kota Bitung	Sulawesi Utara	36
59.	DPRD Kota Jambi	Jambi	33
60.	DPRD Kota Jayapura	Papua	33
61.	DPRD Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	33
62.	DPRD Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	33
63.	DPRD Kota Pekanbaru	Riau	30
64.	DPRD Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara	30
65.	DPRD Kota Pontianak	Kalimantan Barat	30
66.	DPRD Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	30

XI. PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	Universitas Tidar	Jawa Tengah	88
2.	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat	86

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
3.	Universitas Pancasila	DKI Jakarta	82
4.	Universitas Warmadewa	Bali	81
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
5.	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Jawa Barat	73
6.	Universitas Pamulang	Banten	71
7.	Universitas Yarsi	DKI Jakarta	71
8.	Universitas Bandar Lampung	Lampung	70
9.	Universitas Lampung	Lampung	70
10.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	DKI Jakarta	62
11.	Universitas Pancasakti Tegal	Jawa Tengah	62
12.	Universitas Tulang Bawang	Lampung	60
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	Kalimantan Tengah	59
14.	Universitas Narotama	Jawa timur	59
15.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	Lampung	58
16.	Universitas Pasir Pengaraian	Riau	58
17.	Universitas Airlangga	Jawa Timur	56
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
18.	Universitas Muhammadiyah Metro	Lampung	50
19.	Universitas Bengkulu	Bengkulu	40
20.	Universitas Lancang Kuning	Riau	40
21.	Universitas Jember	Jawa Timur	38
22.	STIH Awang Long	Kalimantan Timur	37
23.	Universitas Khairun	Maluku Utara	34
24.	Universitas Balikpapan	Kalimantan Timur	31
25.	Universitas Pendidikan Ganesha	Bali	31
26.	Universitas Sumatera Utara	Sumatera Utara	31

XII. UNIT ESELON I KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	85

No.	Nama Instansi	Nilai
2.	Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	82
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
3.	Direktorat Jenderal Imigrasi	66
4.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	65
5.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	64
6.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	60
7.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	53
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	50
9.	Sekretariat Jenderal	41

XIII. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	93
2.	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	91
3.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	90
4.	Kantor Wilayah Lampung	89
5.	Kantor Wilayah DKI Jakarta	88
6.	Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	87
7.	Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	87
8.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	87
9.	Kantor Wilayah Jawa Barat	86
10.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	86
11.	Kantor Wilayah Jambi	85
12.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	85
13.	Kantor Wilayah Banten	84
14.	Kantor Wilayah Bengkulu	84
15.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	84
16.	Kantor Wilayah Aceh	83
17.	Kantor Wilayah Jawa Timur	83
18.	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	82
19.	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	82

No.	Nama Instansi	Nilai
20.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	82
21.	Kantor Wilayah Riau	81
22.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	81
23.	Kantor Wilayah Bali	80
24.	Kantor Wilayah Sumatera Barat	80
25.	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	79
26.	Kantor Wilayah Papua Barat	78
27.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	78
28.	Kantor Wilayah Papua	77
29.	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	77
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
30.	Kantor Wilayah Maluku	75
31.	Kantor Wilayah Maluku Utara	74
32.	Kantor Wilayah Gorontalo	73
33.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat	73

XIV. UPT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
1.	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	43
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	41
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	35
4.	Politeknik Imigrasi	30

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY